



Analisis Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Investasi Domestik di Indonesia

Maylia Farhan Hariadi¹, Windah Syahrani², Nurain³, Wahjoe Pangestoeti⁴

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: mfhariadi@student.umrah.ac.id

Diterima: 25-06-2025 | Disetujui: 02-07-2025 | Diterbitkan: 05-07-2025

ABSTRACT

Investment is a crucial element in a country's economic growth, and to encourage investment from both domestic and foreign sources, governments often provide attractive tax opportunities and incentives. These tax incentives aim to create a favorable investment climate, increase competitiveness, and support the growth of strategic economic sectors. In this context, tax incentives are defined as facilities provided by the government to facilitate tax payments and motivate taxpayers. The government continues to strive to increase tax revenue through improved regulations, increased taxpayer compliance, and the search for new tax sources. This study aims to analyze the effectiveness of tax incentive policies in increasing domestic investment in Indonesia, by examining the types of incentives provided, the criteria for recipients, and their impact on increasing investment. The results show that tax incentive policies can encourage investment, although challenges such as the risk of moral hazard and the need for effective monitoring remain a concern. Periodic evaluation and adjustment of tax incentive policies are important to ensure a sustainable positive impact on economic growth and national development.

Keywords: Incentive Policy, Tax, Domestic Investment

ABSTRAK

Investasi merupakan elemen krusial dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan untuk mendorong investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah sering kali memberikan peluang dan insentif pajak yang menarik. Insentif pajak ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang menguntungkan, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi strategis. Dalam konteks ini, insentif pajak didefinisikan sebagai fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mempermudah pembayaran pajak dan memotivasi pembayar pajak. Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui perbaikan regulasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan pencarian sumber pajak baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif pajak dalam meningkatkan investasi domestik di Indonesia, dengan mengkaji jenis insentif yang diberikan, kriteria penerima, serta dampaknya terhadap peningkatan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak dapat mendorong investasi, meskipun tantangan seperti risiko moral hazard dan perlunya pengawasan yang efektif tetap menjadi perhatian. Evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan insentif pajak menjadi penting untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Kebijakan Insentif, Pajak, Investasi Domestik

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Maylia Farhan Hariadi, Windah Syahrani, Nurain, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Investasi Domestik di Indonesia. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(3), 599-607. <https://doi.org/10.63822/mgd6mx78>

PENDAHULUAN

Investasi adalah poin penting dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Untuk mendorong investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah seringkali memberikan peluang dan insentif pajak yang menarik (Putra et al., 2023). Peluang dan insentif pajak tersebut bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang menguntungkan, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi yang strategis. Layanan mengurus pajak yang profesional akan bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Definisi paling sederhana dari insentif pajak adalah fasilitas yang diberikan pemerintah kepada orang atau organisasi tertentu untuk mempermudah pembayaran pajak dan memotivasi pembayar pajak untuk membayar pajak mereka (Nabilla & Farah, 2020). Kebutuhan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar dipenuhi dari pajak, yang merupakan sumber utama penerimaan negara. Untuk memenuhi kebutuhan penerimaan negara, penerimaan pajak selalu diupayakan untuk ditingkatkan setiap tahunnya.

Memperbaiki peraturan perundang-undangan, memberlakukan peraturan perpajakan yang baru, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mencari sumber-sumber pajak lainnya adalah beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Fungsi utama pajak adalah untuk mengontrol distribusi kekayaan dan pendapatan di masyarakat, selain fungsi anggaran (Oktivany et al., 2024). Pajak dapat digunakan untuk mendorong upaya pembangunan di wilayah tertentu, memastikan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan. Di antara peran regulasi ini adalah adanya program insentif pajak yang diharapkan dapat menarik investasi.

Investasi domestik merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketersediaan investasi yang memadai akan berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan nasional. Namun, menarik investasi domestik seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti iklim investasi yang kurang kondusif, birokrasi yang rumit, dan ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu, pemerintah kerap kali menerapkan kebijakan insentif pajak sebagai salah satu instrumen untuk merangsang dan mendorong peningkatan investasi domestik.

Kebijakan insentif pajak yang tepat sasaran diharapkan mampu memberikan stimulus positif bagi investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Insentif ini dapat berupa pengurangan pajak penghasilan, pembebasan pajak tertentu, atau fasilitas perpajakan lainnya yang diberikan kepada investor yang memenuhi kriteria tertentu. Namun, efektivitas kebijakan insentif pajak ini sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain desain kebijakan yang tepat, implementasi yang konsisten, dan pengawasan yang efektif.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis seberapa efektif kebijakan insentif pajak dalam mempengaruhi investasi domestik di Indonesia. Analisis ini akan mengkaji berbagai aspek, mulai dari jenis insentif pajak yang diberikan, kriteria penerima insentif, hingga dampaknya terhadap peningkatan investasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka mendorong investasi domestik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

TINJAUAN TEORI

Kebijakan Insentif Pajak

Menurut Sinambela (2020) Insentif pajak adalah sumber daya keuangan dan non-keuangan yang disediakan oleh sistem perpajakan untuk wajib pajak. Berbagai macam hal yang membantu wajib pajak termasuk dalam definisi insentif pajak. Salah satu cara untuk memikirkan program insentif pajak adalah sebagai fasilitas pajak, yaitu kemudahan perpajakan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Insentif pajak merupakan ketentuan perpajakan khusus yang memberikan keringanan kepada wajib pajak. Keringanan ini dapat berupa pembebasan pajak, pengurangan tarif pajak, kredit pajak, atau penundaan kewajiban pajak. Bentuknya beragam, termasuk pembebasan pajak sementara, pengurangan biaya tertentu, dan pengurangan tarif impor atau bea cukai.

Pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan signifikan pada hampir seluruh sektor perekonomian, termasuk sektor perpajakan. Sebagai respons, pemerintah Indonesia meluncurkan stimulus ekonomi, termasuk insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 (revisi PMK Nomor 09/PMK.03/2021). Insentif ini bertujuan meringankan beban wajib pajak yang terdampak pandemi, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dengan memberikan keringanan perpajakan, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak sekaligus menstimulus produktivitas pelaku usaha.

Investasi Domestik

Pembangunan nasional, yang melibatkan pemerintah dan masyarakat, memerlukan pengelolaan sumber daya yang efektif dan kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi adalah investasi, baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA) (Pandiangan et al., 2021). Investasi meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian.

Investasi memengaruhi permintaan agregat dan siklus bisnis, serta berkontribusi pada akumulasi modal yang meningkatkan potensi output dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Nurwanda & Rifai, 2018). PMDN didefinisikan sebagai investasi dalam negeri di Indonesia, sementara penanam modal dapat berupa perorangan atau badan usaha, baik domestik maupun asing (Putri & Manisha, 2021). Peningkatan investasi, baik PMDN maupun PMA, sangat penting untuk pembangunan ekonomi, kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia (Andreadi et al., 2023). Pemerintah juga berperan penting melalui investasi infrastruktur dan penambahan aset.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, yang berjudul "Analisis Kebijakan Insentif Pajak terhadap Investasi Domestik," menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai literatur relevan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kebijakan insentif pajak dan dampaknya terhadap investasi domestik. Analisis dilakukan secara deskriptif, menyajikan informasi secara rinci dan akurat sebagaimana adanya, tanpa interpretasi subjektif atau generalisasi yang melampaui data yang tersedia. Pendekatan ini sejalan dengan definisi metode deskriptif menurut Sugiyono (2019), yang menekankan pada penyajian data tanpa analisis inferensial dan kesimpulan yang berlaku umum. Dengan

demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara detail hubungan antara kebijakan insentif pajak dan investasi domestik berdasarkan temuan literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

kebijakan insentif pajak di Indonesia memiliki beragam jenis dan kriteria penerima yang memengaruhi tingkat investasi domestik. Beberapa jenis insentif yang diteliti meliputi tax holiday, pembebasan pajak impor, pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, dan fasilitas perpajakan lainnya. Kriteria penerima insentif bervariasi tergantung jenis insentifnya, seringkali mempertimbangkan sektor industri (misalnya, industri prioritas, industri pionir), skala investasi, lokasi investasi (daerah tertinggal), dan kinerja perusahaan.

Dampak kebijakan insentif pajak terhadap peningkatan investasi domestik menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menunjukkan korelasi positif antara pemberian insentif pajak dan peningkatan investasi, terutama pada sektor-sektor yang menjadi target insentif. Namun, efektivitas insentif juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti iklim investasi secara umum, kestabilan politik dan ekonomi, birokrasi perizinan, dan akses pembiayaan.

Studi lain menunjukkan bahwa dampak insentif pajak terhadap investasi tidak selalu signifikan atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali, menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap desain dan implementasi kebijakan insentif pajak. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan insentif pajak untuk memastikan bahwa insentif tersebut benar-benar mencapai tujuannya dalam mendorong investasi domestik yang berkualitas dan berkelanjutan.

1. Jenis Insentif Pajak yang Diberikan

Kebijakan insentif pajak di Indonesia mencakup berbagai jenis insentif, antara lain:

Tax Holiday

Tax holiday merupakan insentif fiskal berupa pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan bagi perusahaan yang melakukan investasi di sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap prioritas oleh pemerintah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendorong investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri, dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengurangi beban pajak, perusahaan akan memiliki lebih banyak modal untuk berinvestasi dalam ekspansi usaha, pengembangan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah biasanya memprioritaskan sektor-sektor yang dianggap strategis untuk pembangunan ekonomi, seperti industri manufaktur berteknologi tinggi, energi terbarukan, teknologi informasi, pariwisata, dan infrastruktur. Pemerintah mungkin memberikan insentif lebih besar bagi perusahaan yang berinvestasi di daerah tertinggal atau kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk mengurangi kesenjangan pembangunan regional.

Pembebasan Pajak Impor

Insentif ini diberikan untuk mengurangi biaya barang modal dan bahan baku yang diimpor, sehingga mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam produksi lokal.

Pengurangan PPh Badan

Insentif ini memberikan pengurangan tarif pajak untuk perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti berinvestasi dalam proyek yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

Fasilitas Perpajakan Lainnya

Ini termasuk kredit pajak, penangguhan kewajiban pajak, dan bentuk-bentuk keringanan pajak lainnya yang ditujukan untuk mendorong investasi.

2. Kriteria Penerima Insentif

Kriteria penerima insentif pajak bervariasi tergantung pada jenis insentif yang diberikan. Beberapa kriteria yang umum meliputi:

- **Sektor Industri:** Insentif sering kali ditujukan untuk sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis, seperti manufaktur, energi, teknologi informasi, dan sektor lainnya yang berpotensi memberikan nilai tambah tinggi.
- **Skala Investasi:** Besaran investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian insentif. Perusahaan yang melakukan investasi dalam jumlah besar biasanya lebih diutamakan.
- **Lokasi Investasi:** Pemberian insentif dapat diprioritaskan untuk investasi yang dilakukan di daerah tertinggal atau kawasan ekonomi khusus yang sedang berkembang.
- **Kinerja Perusahaan:** Perusahaan yang menunjukkan catatan kinerja baik dan berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial serta lingkungan juga dapat menjadi kriteria penerima insentif.

3. Dampak terhadap Peningkatan Investasi

Dampak kebijakan insentif pajak terhadap investasi domestik dapat dilihat dari beberapa aspek:

- **Peningkatan Investasi:** Banyak studi menunjukkan bahwa insentif pajak dapat mendorong peningkatan investasi, terutama di sektor-sektor yang ditargetkan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah investasi yang masuk ke dalam sektor-sektor prioritas setelah pemberian insentif.
- **Kualitas Investasi:** Selain kuantitas, insentif pajak juga berpotensi meningkatkan kualitas investasi yang masuk, dengan menarik investor yang berkomitmen untuk berinovasi dan memperkenalkan teknologi baru.
- **Tantangan dan Risiko:** Namun, terdapat juga tantangan, seperti risiko moral hazard di mana beberapa perusahaan mungkin hanya memanfaatkan insentif tanpa berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas insentif yang diberikan.
- **Pengawasan dan Evaluasi:** Untuk memastikan bahwa insentif pajak benar-benar berdampak positif, diperlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa insentif tidak disalahgunakan dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi perekonomian.

Faktor-Faktor Lain yang Mempengaruhi Investasi (di Luar Insentif Pajak)

Di luar insentif pajak, terdapat sejumlah faktor lain yang secara signifikan mempengaruhi keputusan investasi domestik di Indonesia. Faktor-faktor makro ekonomi seperti stabilitas politik dan keamanan negara berperan krusial. Iklim investasi yang kondusif, ditandai dengan regulasi yang jelas, transparan, dan mudah diakses, akan menarik minat investor. Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia

juga mempengaruhi biaya modal, sehingga mempengaruhi daya tarik investasi. Inflasi yang terkendali menciptakan kepastian bagi investor dalam perencanaan jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan berkelanjutan menjadi indikator penting bagi potensi keuntungan investasi. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, termasuk aksesibilitas transportasi, energi, dan teknologi informasi, sangat vital untuk menunjang operasional bisnis. Kualitas sumber daya manusia, meliputi tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja, juga menjadi pertimbangan utama. Persaingan bisnis yang sehat dan adil, tanpa praktik monopoli atau oligopoli, menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investor.

Akses terhadap pembiayaan, baik dari perbankan maupun pasar modal, juga mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi. Terakhir, persepsi investor terhadap risiko investasi di Indonesia, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti korupsi, birokrasi, dan penegakan hukum, turut menentukan keputusan investasi. Semua faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, membentuk suatu ekosistem investasi yang kompleks di Indonesia. Oleh karena itu, analisis kebijakan insentif pajak perlu mempertimbangkan interaksi kompleks antara insentif pajak dengan faktor-faktor non-pajak ini untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang dampaknya terhadap investasi domestik.

Hubungan Insentif Pajak dan Peningkatan Investasi

1. Mekanisme Kerja Insentif Pajak

Insentif pajak bekerja dengan cara mempengaruhi *cost-benefit analysis* perusahaan. Pengurangan beban pajak secara langsung meningkatkan *net present value* (NPV) dari suatu proyek investasi. Hal ini membuat proyek yang sebelumnya mungkin tidak layak secara finansial, menjadi menarik untuk dijalankan. Lebih lanjut, insentif pajak juga dapat mengurangi risiko investasi, terutama bagi proyek-proyek dengan ketidakpastian yang tinggi. Dengan mengurangi beban pajak, perusahaan memiliki *buffer* finansial yang lebih besar untuk menghadapi potensi kerugian. Khususnya, *tax credit* dan *depresiasi dipercepat* memberikan insentif langsung yang mudah dipahami dan dihitung oleh perusahaan, sehingga lebih efektif dalam mendorong investasi.

2. Efektivitas Insentif Pajak yang Berbeda

Tidak semua jenis insentif pajak sama efektifnya. Efektivitasnya bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- **Besarnya insentif**, Insentif yang lebih besar secara umum akan lebih efektif dalam mendorong investasi. Namun, perlu dipertimbangkan pula potensi *deadweight loss* yang mungkin terjadi akibat insentif yang terlalu besar.
- **Target sektor**, Insentif pajak yang ditargetkan pada sektor-sektor prioritas (misalnya, energi terbarukan, teknologi tinggi) cenderung lebih efektif daripada insentif yang bersifat umum.
- **Kemudahan akses**, Insentif pajak yang rumit dan sulit diakses akan mengurangi efektivitasnya. Proses pengajuan dan administrasi yang sederhana dan transparan sangat penting.

- **Transparansi dan akuntabilitas,** Kejelasan dan transparansi dalam penerapan insentif pajak sangat penting untuk membangun kepercayaan investor. Sistem yang rentan terhadap korupsi akan mengurangi efektivitas insentif.

3. Interaksi dengan Faktor-faktor Non-Pajak

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, insentif pajak bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan investasi. Efektivitas insentif pajak sangat bergantung pada kondisi lingkungan bisnis secara keseluruhan. Jika faktor-faktor non-pajak seperti stabilitas politik, infrastruktur yang buruk, atau birokrasi yang rumit, menjadi kendala, maka insentif pajak mungkin tidak akan efektif dalam mendorong investasi. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin ragu untuk berinvestasi di suatu daerah meskipun ada insentif pajak yang menarik, jika infrastruktur yang buruk menyebabkan biaya operasional yang tinggi. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak harus diintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung iklim investasi yang kondusif.

4. Pertimbangan Distribusi dan Ekuitas

Penerapan insentif pajak juga perlu mempertimbangkan aspek distribusi dan ekuitas. Apakah insentif pajak tersebut benar-benar mencapai target yang diinginkan, yaitu mendorong investasi di sektor-sektor yang dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas? Adakah potensi terjadinya *moral hazard* atau *rent-seeking* yang dapat merugikan keuangan negara? Evaluasi yang komprehensif terhadap dampak distribusi dan ekuitas dari insentif pajak sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan kebijakan.

5. Pengukuran Efektivitas Insentif Pajak

Mengukur efektivitas insentif pajak merupakan tantangan tersendiri. Metode pengukuran yang tepat perlu digunakan untuk mengisolasi dampak insentif pajak dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi investasi. Studi empiris yang menggunakan metodologi yang kuat, seperti *difference-in-differences* atau *instrumental variables*, diperlukan untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliabel.

SIMPULAN

Analisis kebijakan insentif pajak terhadap investasi domestik di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi untuk mendorong peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan beragam jenis insentif, seperti tax holiday, pembebasan pajak impor, dan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor strategis. Kriteria penerima insentif yang mempertimbangkan sektor industri, skala investasi, lokasi, dan kinerja perusahaan membantu memastikan bahwa insentif tersebut tepat sasaran. Meskipun insentif pajak dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas investasi, tantangan seperti risiko moral hazard dan perlunya pengawasan yang ketat memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa insentif pajak benar-benar memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreadi, A., Suhaidar, S., & Anggita, W. (2023). Pengaruh Foreign Direct Investment, Domestic Investment, Dan Belt And Road Initiative Terhadap Gross Domestic Product Indonesia. *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 4(2), 52–66.
- Nabilla, R., & Farah, F. (2020). Pengaruh Penerapan e-filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3). <http://www.pajak.go.id/>
- Nurwanda, A., & Rifai, B. (2018). Diagnosis pertumbuhan ekonomi dan output potensial Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 2(3), 177–194.
- Oktivany, C., Agustria, & Tika. (2024). Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam. *KENDALI: Economics and Social Humanities*, 2(3), 180–190.
- Pandiangan, F. O. , Pasaribu, J. , G., D., T. M. , & Lapikolly, R. D. (2021). ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN), PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2000-2020. *Visi Sosial Humaniora*, 1, 99–109.
- Putra, A. K., Rafi, A., Darmawan, R. P., & Wikansari, R. (2023). Peran pemerintah meningkatkan perdagangan internasional khususnya ekspor. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 1–10. <https://doi.org/10.59827/jie.v2i3.94>
- Putri, V., & Manisha, K. (2021). Analisis Minat Penanaman Modal Dalam Negri Dan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 757–767.
- Sinambela, T. (2020). *Kebijakan dan Insentif Pajak di masa Pandemi Covid-19: Panduan dan Aplikasi*. Yayasan Anak Bangsa Cendekia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research Dan Development*. Alfabeta.